

## BAB II

### **DINAMIKA KONFLIK SUKU UYGHUR DENGAN SUKU HAN SERTA KEBIJAKAN PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP SUKU UYGHUR**

Tiongkok adalah salah satu negara maju yang berkembang sangat pesat, khususnya dalam perekonomian. Namun hal itu tidak membuat Tiongkok lepas dari konflik, justru sebaliknya Tiongkok rentan memiliki konflik. Tidak hanya memiliki satu atau dua masalah konflik internal, beberapa masalah seperti Tibet, kebijakan *One China Policy* terhadap Taiwan, serta Xinjiang menjadikan negara ini semakin menarik untuk dikaji. Salah satu kasus konflik internal Tiongkok ialah Kerusuhan Xinjiang. Xinjiang merupakan salah satu provinsi sebelah Barat Laut Tiongkok yang sering berbenturan dengan kepentingan politik pemerintah Beijing yang mayoritas Tiongkok Han. Xinjiang adalah contoh konflik internal yang cukup menarik di Tiongkok karena merupakan bentuk konflik antar etnis yang kemudian berkembang menjadi gerakan separatisme. Konflik antar etnis yaitu suku Uyghur dan suku Han, dimana suku Uyghur adalah keturunan Turki dan suku Han adalah keturunan Tiongkok. Banyak faktor yang menjadi penyebab konflik, salah satunya adalah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Tiongkok. Pada bab ini penulis akan memaparkan dinamika konflik suku Uyghur dan suku Han, dimulai dari sejarah suku Uyghur memasuki salah satu wilayah Tiongkok hingga terjadi konflik dan mengalami eskalasi pada kerusuhan Urumqi. Dilanjutkan dengan pemaparan mengenai regulasi Pemerintah Tiongkok terhadap suku Uyghur yang menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik, dimana etnisitas sebagai salah satu factor utama terjadinya konflik. Kemudian yang terakhir penulis akan memaparkan bagaimana etnisitas dan nasionalisme di Tiongkok sehingga penulis sangat mempertimbangkan bahwa etnis sangat berperan penting di sini.

## **2.1 Sejarah Masuknya Suku Uyghur ke Xinjiang**

Xinjiang secara historis merupakan perhubungan dimana Timur bertemu Barat, berada di sepanjang jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok kuno dengan Eropa. Xinjiang adalah wilayah otonom di Republik Rakyat Tiongkok. Letaknya sangat jauh di sebelah barat Beijing sehingga secara efektif berjarak dua jam dari ibukota. Xinjiang juga beroperasi pada waktu Beijing, khususnya untuk transportasi udara dan kereta api jarak jauh dan komunikasi dengan Beijing dan kantor-kantor pemerintah, dan juga pada waktu lokal untuk penggunaan informal. Pada tahun 1880-an, Xinjiang berubah dari ketergantungan menjadi provinsi kekaisaran (Dwyer, 2015).

Bangsa Uyghur atau disebut juga sebagai East Turkistan merupakan suku bangsa keturunan Turkic yang lebih dekat kekerabatannya terhadap bangsa Turki ketimbang Tiongkok. Uyghur telah mengenal agama Islam sejak kerajaan Karakhanid berdiri di Xinjiang Timur pada tahun 934 Masehi. Selama 60 tahun lebih bangsa Uyghur berada di bawah penjajahan Tiongkok, hingga tahun 1944 bangsa Uyghur baru bisa memperoleh kembali kemerdekaannya dengan memberontak pemerintah Republik Tiongkok yang saat itu sedang didominasi partai Nasionalis Tiongkok (uyghuramerican.org, 2012). Namun tak lama setelah itu bangsa Uyghur harus kembali mengalami penjajahan ketika Partai Komunis Tiongkok berkuasa di dataran Tiongkok pada tahun 1949. Beberapa dekade berikutnya isu-isu penindasan pun mulai bermunculan seperti dibatasinya institusi agama, dikecangkannya kebebasan berpendapat, dan terdapat migrasi besar-besaran etnis Han Tiongkok ke daerah ini (newint.org, 2018).

Mayoritas Uyghur tinggal di wilayah Xinjiang yang strategis dan penting. Pentingnya kawasan ini tumbuh ketika Tiongkok berkembang maju dengan inisiatif Sabuk dan Jalan Xi Jinping. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi antara Tiongkok dan negara-negara tetangga di Asia Tengah dan Tenggara. Xinjiang berbatasan dengan negara-negara Tengah dan Asia seperti Kazakhstan, Tajikistan, Afghanistan, dan Pakistan (Fahri, 2013).

Lalu pada tahun 1884, Xinjiang secara resmi dinyatakan sebagai provinsi. Pada saat itu merupakan rumah bagi mayoritas suku Uyghur yang besar, dengan komunitas yang lebih kecil dari orang-orang Asia Tengah lainnya (misalnya Kazakh, Kirghiz, Mongol, Tajik), serta migran Han dan Hui dari provinsi

Tiongkok ke timur. Imigrasi pada saat itu telah meningkat pesat dalam populasi Tiongkok Han; dengan memperhitungkan populasi pekerja migran yang mengambang, populasi ini sekarang diyakini melebihi populasi Uyghur (Bovingdon, 2004).

Pada tahun 1955, Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur didirikan, dan suku Uyghur ditetapkan sebagai kebangsaan resmi. Tingkat otonomi dinikmati oleh semua kelompok etnis di wilayah ini melalui sistem 'otonomi bertingkat'. Biasanya, badan pemerintah lokal dikepalai oleh suku diluar suku Han, tetapi dengan kepala partai Han di sisinya. Sistem otonomi hanya dikodifikasikan pada tahun 1984 dengan disahkannya Undang-Undang Otonomi Etnis Daerah. Datang setelah seruan Sekretaris Jenderal Partai Hu Yaobang saat itu untuk 'etnisasi' wilayah minoritas, undang-undang ini melindungi bahasa dan budaya minoritas, dan menyediakan tingkat pemerintahan mandiri minimum (walaupun ketentuan ini dilemahkan pada tahun 2001). Undang-undang tersebut memuat sedikit keterangan konkret dan kebijakan tertentu yang semula dirancang untuk melindungi bahasa dan budaya minoritas yang kini dipandang sebagai penghambat integrasi. Sekolah bahasa Uyghur, misalnya, digantikan oleh 'pendidikan bilingual', yang membayangkan pengenalan Bahasa Mandarin Standar dari tingkat pra-sekolah (Dwyer, 2015).

Seypidin Ezizi, seorang Uyghur, menjabat sebagai ketua Dewan Rakyat *Xinjiang Uighur Autonomous Region* (XUAR). Wang Enmao, seorang jenderal Han, tetap memegang jabatan tertinggi di militer regional dan Partai Komunis Tiongkok. Pola kepemimpinan ini masih berlanjut hingga hari ini, dengan seorang Uyghur sebagai ketua XUAR tetapi kekuatan sebenarnya dipegang oleh seorang keturunan Tiongkok Han sebagai bos Chinese Communist Party / Partai Komunis China (PKC). Setelah perpindahan besar etnis Uyghur dan Kazakh ke Uni Soviet pada tahun 1962, setelah perpecahan Sino-Soviet dan penutupan perbatasan berikutnya, sedikit yang diketahui tentang apakah mobilisasi politik besar oleh Uyghur terjadi selama tahun-tahun Revolusi Kebudayaan. Sebagian karena sifat negara Tiongkok yang bergejolak dan represif selama tahun-tahun ini dan sebagian karena penutupan Xinjiang dari pengaruh luar, oposisi Uyghur terhadap

pemerintahan Tiongkok secara bertahap menjadi lebih nasionalistis selama tahun 1980-an (Dillon 2004, 59).

## **2.2 Dinamika Konflik Suku Uyghur dengan Suku Han**

Pada 1990-an, pemerintah Xinjiang menekankan pengembangan bagian utara wilayah di mana pondasi industri lebih baik. Karena mayoritas Muslim Uyghur tinggal di Xinjiang selatan, perkembangan yang tidak seimbang secara geografis ini jadi membuat suku Uyghur semakin dirugikan dalam kesejahteraan. Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi utara-selatan ini, Beijing telah mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) skala besar untuk berinvestasi di Xinjiang selatan sejak akhir 1990-an. Pengenalan perusahaan besar, yang sebagian besar adalah PetroChina (sebuah perusahaan asal Republik Rakyat Tiongkok yang bergerak di sektor energy) dan Sinopec (perusahaan minyak terbesar di Republik Rakyat Tiongkok). Tetapi hal itu hanya memperbesar kesenjangan ekonomi antara Han dan Uyghur, dan antara Xinjiang dan provinsi lain. Perusahaan-perusahaan negara ini lebih suka mempekerjakan pekerja Han untuk keterampilan teknis mereka (Dwyer, 2005). Perusahaan-perusahaan ini juga tidak membayar pajak pendapatan kepada pemerintah Xinjiang, tetapi ke Beijing atau Shanghai, karena mereka terdaftar di Beijing dengan anak perusahaan pipa minyak dan gas mereka yang terdaftar di Shanghai. Kebijakan preferensial Tiongkok di Xinjiang juga telah mempertajam kesenjangan etnis, mendistribusikan manfaat sesuai dengan status etnis orang dan membuat orang tidak setara secara politik dan ekonomi. Ini hanya meningkatkan kesadaran etnis minoritas dan menghambat pengembangan identitas Tiongkok. Sistem otonomi daerah etnis minoritas, sampai taraf tertentu, bertentangan dengan prinsip-prinsip integrasi nasional.

Untuk mendorong pembangunan dan mengintegrasikan Xinjiang secara lebih penuh ke Tiongkok, Beijing telah mencoba berbagai program, salah satunya adalah migrasi orang Tiongkok Han ke wilayah tersebut. Menurut *Council on Foreign Relations*, suku Han Tiongkok membentuk sekitar 6,7% dari populasi Xinjiang pada tahun 1949 dan 40% pada tahun 2008. Namun, Uyghur tidak terlalu memperlihatkan hal yang sama seperti Hui ke Han sebelum pergerakan ini,

sehingga memicu ketegangan etnis antara Uyghur dan Han. Selain itu, integrasi yang telah membawa Han dalam golongan istimewa sebagai karyawan di perusahaan energi negara, kepala berbagai lembaga pemerintah dan secara besar-besaran di tentara dan kepolisian.

Disatu sisi, faktor yang menyebabkan konflik internal Xinjiang berdasarkan penjelasan dinamika di atas adalah karena ketidakpuasan, kemiskinan, dan juga ketidakstabilan. Interaksi tersebut jadi menciptakan sebuah permasalahan yang rumit dan kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung bagi terbentuk dan berkembangnya konflik Xinjiang. Masyarakat sipil di Xinjiang telah mengalami banyak kekerasan akibat langkah militer yang ditempuh oleh pemerintah Tiongkok, sehingga masyarakat semakin sulit menjadi kooperatif. Etnis Uyghur yang terpinggirkan akhirnya memilih untuk menuntut hak merdeka dan melancarkan aksi separatisme dan hal ini semakin memperpanjang keberlangsungan konflik internal ini (Dwyer, 2005).

Disisi lain, penyebab berlarutnya konflik internal di Tiongkok dapat dilihat dari sisi pemerintah Tiongkok. Tiongkok merupakan salah satu negara yang berasal dari salah satu peradaban tertua di dunia. Karena itu juga telah menyebabkan Tiongkok memiliki catatan sejarah yang panjang dan dinamika politik yang cukup rumit. Salah satu masa dimana Tiongkok mengalami perubahan besar adalah pada tahun 1949 yaitu masa dimana Tiongkok berhasil ditaklukan komunis dibawah payung kekuasaan Mao. Sejak saat itu terjadi banyak kontroversi terhadap pemerintahan sah Tiongkok. Sistem politik komunisme yang dianut Tiongkok yang berlanjut sampai saat ini menjadikan pemerintahan Tiongkok menjadi sentralistik dan sulit menerima heterogenitas. Persepsi organisasi keagamaan yang terlibat dalam kegiatan separatis telah memperkuat sikap anti-agama. Meskipun pemerintah telah melonggarkan kendalinya dalam dekade terakhir, kebijakan agamanya tetap terlalu ketat. Kebijakan semacam itu telah menyinggung banyak Muslim dan memperparah keluhan dalam komunitas Uyghur (Wadrianto, 2017).

Tiongkok akhirnya mengambil langkah militer untuk mengatasi konflik. Hal ini justru membuat etnis Uyghur semakin terdesak, dan akhirnya muncul beberapa gerakan terorisme. Tudingan yang terus menerus memojokan etnis

Uyghur memperburuk konflik di Xinjiang ini. Sejak tahun 2001, kisah-kisah konflik Xinjiang muncul dengan semakin seringnya pers internasional. Sementara banyak layanan media Barat menyiratkan bahwa sumber konflik di Xinjiang terletak pada perbedaan budaya antara Uyghur dan Tiongkok, pers Tiongkok baru-baru ini menganggap hampir semua sumber permasalahan berasal dari perbedaan pendapat dengan terorisme internasional. Retorika terakhir adalah bagian dari kebijakan bahasa Tiongkok monokultural yang lebih besar, yang dengan hati-hati mengandung konotasi istilah seperti "Turkistan Timur," "Muslim," dan "teroris." Menurut Dwyer, kebijakan AS terhadap separatisme di Xinjiang telah secara signifikan dipengaruhi oleh wacana pers Tiongkok yang dikelola ini.

Siapa pun yang bepergian atau tinggal di Xinjiang tidak akan sulit untuk memperhatikan jarak sosial antara Uyghur Turki dan Han Tiongkok. Karakteristik paling mencolok dari hubungan kelompok antar etnis kedua pihak jelas dibatasi batas antara kedua kelompok di ruang sosial. Seseorang bahkan bisa berbicara tentang pemisahan diri dari kedua kelompok tersebut, terutama di daerah perkotaan dimana kedua kelompok melakukan kontak mata secara langsung. Sangat jarang Uyghur dan Han bersosialisasi satu sama lain di Xinjiang, kecuali jika itu mutlak tidak dapat dihindari, seperti di tempat kerja, sekolah, atau publik lainnya. Dalam kehidupan pribadi sehari-hari, interaksi antara dua kelompok sangat minim. Dari wawancara dan observasi, perpecahan sosial yang kuat antara kedua kelompok bisa diidentifikasi terutama terjadi di bidang makanan, pernikahan, tempat tinggal, zona waktu, dan penggunaan bahasa. Sebagai penanda yang signifikan, agama sering dikaitkan dengan perpecahan di antara orang-orang di berbagai masyarakat. Dalam kasus Xinjiang, perbedaan agama antara kedua kelompok sering ditekankan sebagai permasalahan utama. Sebagian besar mayoritas orang Uyghur adalah Muslim, dan bahkan lebih sedikit Uyghur yang taat menjalankan pola makan halal yang relatif ketat. Babi, yang dilarang dalam agama mereka, adalah makanan pokok Tiongkok Han. Secara umum dinyatakan bahwa untuk alasan ini mustahil bagi orang Uyghur untuk mengunjungi rumah tangga Tiongkok Han, apalagi bagi mereka untuk makan bersama. Menurut kutipan di BBC, saat bertanya mengapa Uyghur dan Han sangat jarang

bersosialisasi, orang akan menjawab karena perbedaan pola makan. Restoran di Xinjiang dibedakan oleh status halal mereka. Meskipun Han Orang Tiongkok sesekali makan di restoran halal, Uyghur tidak akan pernah mengunjungi yang non-halal. Beberapa orang Uyghur bahkan menghindari restoran halal non-Uyghur yang dioperasikan karena kecurigaan bahwa orang Tiongkok Han mungkin terlibat dalam operasi mereka dan dengan demikian perusahaan mungkin tidak mempertahankan standar yang sesuai. Bagi orang Tiongkok Han, yang ekspresi kultural dan sosialisasinya sering berpusat pada makan dan minum, kebiasaan pola makan ini membuat sulit untuk berteman dengan orang Uyghur.

Puncaknya adalah pada 5 Juli 2009, Xinjiang menyaksikan kerusuhan besar-besaran di ibu kota Urumqi dengan jumlah korban yang sangat tinggi. Pada hari itu, ratusan orang Uyghur di Urumqi pergi untuk memprotes kematian dua pekerja Uyghur di sebuah pabrik di Tiongkok Selatan, dan demonstrasi segera berubah menjadi kerusuhan mematikan (Dillon, 2004). Mungkin frustrasi dengan pasukan polisi yang mencoba menghentikan demonstrasi, banyak pemrotes menyerang warga sipil tak berdosa, yang secara khusus menargetkan warga Tiongkok Han. Menurut ABC Australia, total 197 orang tewas akibat kerusuhan, mayoritas dari mereka adalah orang Tiongkok Han.

Ribuan tentara segera dibawa untuk memaksakan ketertiban melalui penangkapan massal. Tak berhenti di situ, dua hari kemudian, frustrasi dan marah dengan hilangnya begitu banyak nyawa Tiongkok Han, ribuan warga Tiongkok Han berbaris di Urumqi, dipersenjatai dengan tongkat dan batang besi, siap untuk berperang kembali di Uyghur (Millward, 2010). Hubungan antara kedua kelompok telah menjadi sangat tegang, mengancam perdamaian dan stabilitas Xinjiang di masa depan.

## **2.3 Kebijakan Pemerintah Tiongkok Terhadap Suku Uyghur**

### **2.3.1 Mempertahankan Xinjiang sebagai Wilayah Kedaulatan Tiongkok**

Sebagai sebuah negara, Tiongkok sampai saat ini terus mempertahankan *One China Policy*. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan utama Tiongkok adalah kedaulatan, sehingga tentu Tiongkok tidak akan membiarkan terlepasnya satu wilayah pun dari Tiongkok. Berbagai penyebab ini tentu tidak dapat

dilepaskan dari betapa berharganya Xinjiang bagi pemerintah Tiongkok. Xinjiang berarti penting baik secara strategis maupun ekonomis bagi Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok memang selama ini bersikap cukup keras dalam menyikapi berbagai kerusuhan yang ada di Xinjiang. Pemerintah memilih agar berbagai konflik di Xinjiang itu dieliminasi secara agresif melalui agresi militer (Dwyer, 2005). Berbagai realisasi kebijakan tersebut antara lain terjadinya genosida, bahkan wanita dan anak-anak menjadi korban. Tiongkok melakukan tindakan itu dengan alasan utama yang menyangkut kepentingan nasional Tiongkok yaitu keutuhan wilayah. Hal yang menjadi pertimbangan sendiri bagi pemerintah Tiongkok mengingat keutuhan wilayah ialah bagian kedaulatan negara yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara manapun, ditambah wilayah Xinjiang memang sangat bernilai penting bagi Tiongkok.

Xinjiang bernilai sangat ekonomis. Terutama sejak penemuan ladang minyak yang menambah posisi Xinjiang secara geoekonomi lebih penting dan merupakan wilayah paling krusial bagi Tiongkok. Pemerintah Tiongkok sudah tentu tidak mau melepaskan wilayah ini begitu saja.

Dilansir dari *HKTDC Research*, Xinjiang adalah penghasil terbesar kapas dan lavender. Selain itu, dengan padang rumput terbesar kedua, Xinjiang merupakan salah satu daerah peternakan domba dan wol yang menjadi basis produksi di Tiongkok. Xinjiang juga kaya akan sumber daya energi. Wilayah ini memiliki cadangan terbesar minyak, gas alam dan batu bara di dalam negeri. Adapun cadangan batubara sebesar 40% dari total negara. Cadangan minyak dan gas yang ditemukan di Tarim, Junggar dan Turpan-Hami wilayah Xinjiang ialah seperempat dan sepertiga dari total negara. Xinjiang bahkan memiliki sumber daya mineral yang besar juga. Ada lebih dari 130 jenis deposit mineral didirikan. Cadangan beryllium and mica di wilayah adalah yang tertinggi di Tiongkok.

Berdasarkan arti penting ekonomis dari wilayah Xinjiang ini, maka penting bagi pemerintah Tiongkok untuk mengamankan wilayah Xinjiang terutama dengan menjaga Xinjiang tetap dalam wilayah bagian Tiongkok. Pemerintah Tiongkok cenderung tidak akan membiarkan Xinjiang lepas dari Tiongkok dan akan mempertahankan keutuhan wilayah Tiongkok.

### **2.3.2 Mempersulit Kebebasan Beragama Terutama Muslim**

Urumqi merupakan kota yang mayoritas berisi suku Han, tetapi ada lebih banyak Uyghur di Xinjiang daripada Han. Hui dan Uyghur adalah dua kelompok Muslim terbesar di Tiongkok, keduanya memiliki lebih dari 10 juta orang. Tetapi Tiongkok memiliki lebih dari 1,2 miliar orang yang secara resmi terdaftar sebagai Han di kartu identitas mereka.

Islamofobia dan permusuhan umum terhadap Muslim di Tiongkok telah dimulai pada 1990-an. Menurut Bovington, ia sempat melakukan penelitian lapangan langsung kesana dan sempat memiliki banyak teman-teman dari Uyghur. Ia mengatakan bahwa mereka para Uyghur yang beragama Muslim merasa dunia telah meninggalkan mereka.

Setelah kejadian terror bom WTC 9/11 Amerika Serikat melancarkan perang melawan terorisme yang mencapai domestik dan internasional, sehingga memberi Tiongkok alasan untuk membenarkan tindakannya sendiri terhadap ancaman yang dirasakan dari separatis Uyghur sebagai bagian dari gerakan global yang lebih besar. Dengan munculnya ISIS dan riak-riak Islamofobia global, ketegangan terus meningkat. Namun, para ahli umumnya mengkategorikan Muslim Tiongkok sebagai Muslim "moderat," menekankan bahwa ekstremisme Islam radikal bukanlah ancaman besar di negara tersebut.

Tiongkok bukan satu-satunya tempat dimana nasionalisme meningkat dan dimana sentimen anti-Muslim dapat didengar. Tiongkok telah mempertahankan hubungan yang kuat dengan banyak negara Timur Tengah. Tiongkok telah menjalin kesepakatan minyak dengan Iran dan Irak dan mempertahankan hubungan dengan pemerintah Assad di Suriah. Xinjiang memiliki banyak sumber daya mineral dan ikatan geografis dan budaya di Asia Tengah. Karena hubungan perdagangan dengan Timur Tengah penting bagi Tiongkok, orang mungkin berasumsi bahwa ia akan lebih sadar akan perlakuannya terhadap Uyghur dan Muslim di dalam perbatasan negara mereka. Tetapi Tiongkok tampaknya telah belajar bahwa kekuatan ekonominya lebih penting.

Dilarang memanjangkan jenggot bagi para pria, dan dilarang menggunakan kerudung bagi wanita di depan publik adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap Uyghur. Semakin menguatnya isu-isu mengenai ekstremisasi, maka pemerintah Tiongkok semakin

ketat dalam mengawasi kegiatan beragama bagi para Muslim. Tak berhenti di situ, para Uyghur juga dilarang menjalankan puasa pada bulan Ramadhan (Armandhanu, 2016). Uyghur kembali merayakan Idul Fitri dengan situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Sejumlah gambar satelit dan analisis visual oleh Earthrise Alliance kepada *AFP* menunjukkan ada 36 masjid dan bangunan keagamaan lainnya yang diruntuhkan atau dihapus oleh pemerintah setempat sejak 2017. Sedangkan pada masjid yang masih berdiri, para jemaat harus melewati *metal detector* untuk melaksanakan kewajiban mereka kepada Yang Maha Kuasa, atau sekadar menjalankan keyakinan mereka.

### **2.3.3 Kebijakan Bahasa Nasional**

Kebijakan bahasa telah menjadi jantung pembangunan bangsa Tiongkok. Tak lama setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRC), kebijakan bahasa di wilayah perbatasan Tiongkok responsif terhadap kondisi lokal dan bisa dibilang salah satu yang paling fleksibel di dunia. Namun belasan tahun terakhir bahasa terselubung sedikit demi sedikit semakin berkembang, walaupun memang bahasa resmi Tiongkok sendiri masih tetap konstan atau stabil. Kecenderungan ini sangat menonjol di wilayah Xinjiang, dimana multibahasa dan pluralisme budaya semakin dibatasi dalam mendukung model monolingual dan monokultural.

Penelitian ini melacak evolusi kebijakan bahasa minoritas pemerintah RRC dengan mengevaluasi dua aktor utama (RRC dan Uyghur) serta dua aktor lainnya (pertama, republik-republik Asia Tengah yang baru merdeka, dan kedua, Amerika Utara dan Eropa). Kelompok pinggiran relevan dengan bagaimana RRC telah menerapkan dan menyempurnakan kebijakan bahasanya di wilayah perbatasan. Pergeseran kebijakan baru-baru ini di republik-republik Asia Tengah yang bertetangga (dengan populasi mereka yang berbahasa Turki) berfungsi sebagai Tiongkok yang berharga telah menangani kasus-kasus bahasa minoritasnya. Sebaliknya, Amerika Utara dan Eropa tidak relevan untuk kebijakan minoritas Tionghoa sampai tahun 2001.

Kebijakan bahasa asli RRC di wilayah perbatasannya, yang integrasionis tetapi tidak asimilatif, didirikan dengan baik dan umumnya diterima oleh pejabat partai maupun oleh kelompok minoritas nasional sendiri, kebijakan pluralistik

seperti itu, yang bisa dibbilang mendukung kelompok etnis nasional dan lokal, menonjol positif. Namun dimulai pada pertengahan 1980-an, Beijing mulai bergeser dari akomodasi budaya ke arah kebijakan asimilasi yang terang-terangan. Pergeseran ini hanya berfungsi untuk memperkuat nasionalisme Uyghur dan gerakan separatis kecil, dengan potensi untuk merusak integritas teritorial RRC dan upaya Tiongkok untuk membangun negara Tiongkok modern. Mendukung pemeliharaan bahasa dan identitas Uyghur tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan bangsa Tiongkok. Bahkan, pada akhirnya akan mendukung tujuan itu (Dwyer, 2005).

Selain kebijakan bahasa terbuka RRC, termasuk bahasa pendidikan dan standardisasi, kebijakan terselubung untuk akulturasi dan asimilasi minoritas telah menjadi lebih menonjol, sebagaimana tercermin dalam penggunaan wacana baru-baru itu yang mencirikan gerakan nasionalis Uyghur sebagai teroris. Amerika Serikat, melalui apa yang disebut "perang melawan terorisme", membiarkan dirinya disesatkan oleh laporan media Tiongkok pasca-9/11 tentang hubungan antara Uyghur dan militan Islam. Dengan melakukan hal itu, Amerika Serikat telah mencampuradukkan nasionalisme Uyghur dengan "terorisme," sehingga membenarkan kolaborasi pemerintah AS-Tiongkok dalam proyek Partai Komunis Tiongkok untuk menekan minoritasnya sendiri. Retorika media Tiongkok yang menggambarkan kaum nasionalis Uyghur sebelum dan sesudah tahun 2001 menunjukkan pergeseran yang jelas dari separatis menjadi "teroris Islam" karena menamakan lebih dari lima puluh kelompok teroris Uyghur. Sebagian besar media Barat, yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan Tiongkok barat, telah menyesuaikan, menyamakan kelompok separatis pinggiran ini dengan teroris. Sayangnya, delapan hingga sepuluh juta Uyghur menjadi bersalah karena pergaulan. Pengakuan Washington hanya salah satu dari kelompok separatis yang secara resmi adalah teroris telah menciptakan iklim ketidakpercayaan dalam pemerintahan dan masyarakat terhadap Uyghur secara keseluruhan.

Baik Beijing dan Washington akan kehilangan peluang politik yang krusial di wilayah yang sangat luas ini. Sikap garis keras baru Beijing, yang membatasi bahkan bahasa dan budaya, telah menjengkelkan banyak warga Xinjiang moderat yang pernah enggan menerima pembatasan politik Tiongkok sebagai harga

pembangunan ekonomi regional. Pemerintah RRC masih memiliki kesempatan untuk memenangkan kembali orang-orang ini dengan kebijakan budaya yang lebih pluralistik yang menekankan dukungan untuk Uyghur dan bahasa minoritas lain yang relevan dengan kebijakan dan yang memudahkan pembatasan budaya lainnya, terutama pada agama. Tanpa perubahan kebijakan seperti itu, seperti yang diketahui Beijing, Xinjiang bisa menjadi Kashmir Tiongkok. Tetapi, jika kebijakan RRC saat itu tetap pada jalurnya, setiap perubahan kemungkinan akan menjadi lebih ketat, karena pemerintah mempertimbangkan akomodasi budayanya.

#### **2.4 Pentingnya Nasionalisme Bagi Tiongkok**

Berawal dari runtuhnya pemerintahan Uni Soviet, arus globalisasi yang terus berkembang, dan kebangkitan perekonomian Tiongkok yang sangat pesat membuat Tiongkok merasa perlu memiliki suatu hal yang dapat memberikan identitas nasional tertentu bagi masyarakatnya. Yang dimaksud di sini adalah identitas yang membedakan masyarakat di Tiongkok dengan masyarakat di negara lain sekaligus mengintegrasikan rasa persatuan dan kesatuan warga negaranya. Menurut penulis, pemerintah dan rakyat memiliki peran yang sangat besar dalam proses tersebut. Karena itu Tiongkok yakin bahwa penggunaan nasionalisme dapat membentuk identitas kesatuan itu sendiri.

Namun dalam usaha pemerintah untuk mengimplementasikan konsep nasionalisme, ternyata tidak seluruh masyarakat yang berada di Tiongkok adalah keturunan Tiongkok (keturunan Tiongkok identic dengan etnik Han yang merupakan salah satu etnik terbesar di Tiongkok). Beberapa etnis seperti masyarakat di Tibet dan etnis Uyghur di Xinjiang yang ternyata tidak memiliki identitas yang serupa dengan masyarakat Tiongkok kebanyakan, baik secara histori, kultural, dan budaya.

Pemerintah Tiongkok sudah berusaha melakukan integrasi Uyghur ke dalam satu-kesatuan negara Tiongkok, namun pemasalahan itu masih jauh dari target yang diharapkan. Meskipun memang Uyghur berada di bawah kedaulatan Tiongkok, tetapi propaganda yang cukup tinggi masih belum bisa mencapai dengan optimal. Dilihat dari Kerusuhan Urumqi tahun 2009 jelas kebijakan

Tiongkok belum berhasil mengatasi gerakan etnis dan separatisme. Kuatnya nasionalisme di Tiongkok itu sendiri tidak mungkin lepas dari peran etnik Han yang merupakan mayoritas di Tiongkok.

Berdasarkan tulisan Dwyer, penulis melihat suatu ironi. Pemerintah Tiongkok berusaha menerapkan nasionalisme tanpa mempedulikan adanya perbedaan etnis. Meski begitu kenyataannya nasionalisme yang dimiliki Tiongkok sangat erat dengan etnik tertentu, contohnya Han. Di satu sisi, pemerintah perlu menyatukan nasionalisme untuk mendapat identitas negara, tetapi di satu sisi hal itu sangatlah erat dengan mayoritas di Tiongkok. Karena Han adalah mayoritas di Tiongkok, maka kebijakan pemerintah akan lebih cenderung dengan identitas mereka.

## **2.5 Tanggapan Internasional Terhadap Konflik Uyghur**

Bangsa Uyghur mulai melancarkan gerakan kemerdekaan atau separatis. Di mata para pemimpin Tiongkok, hal ini sudah menjadi alasan yang cukup untuk menindak mereka secara keras. Selain itu gerakan separatisme di Xinjiang tidak murni politis, tetapi juga dibungkus dalam bingkai muslim. Gerakan Islamis Turkistan Timur saat ini diakui oleh PBB atau Amerika Serikat sebagai gerakan teror. Dilansir dari *New York Times*, sejak beberapa tahun kelompok ini melancarkan serangan teror spektakuler, seperti ledakan bom di stasiun kereta Kunming pada 2014 yang menewaskan lebih dari 30 warga sipil. Pemerintah kerap menggunakan alasan ini untuk membenarkan kebijakan mereka terhadap Uyghur. Cara ini yang digunakan pemerintah Tiongkok terhadap berbagai kelompok oposisi, yakni lewat persekusi, intimidasi maksimal dan juga dengan *camp* kerja paksa yang kini disebut *camp* re-edukasi.

Ketika Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya mengecam atas perbuatan Tiongkok terhadap Uyghur, justru sebaliknya dengan negara-negara mayoritas Muslim yang mendukung Tiongkok. Kritik terhadap Tiongkok soal pelanggaran HAM terhadap bangsa Uyghur kebanyakan datang dari negara barat. Sampai beberapa tahun silam Turki misalnya mendukung perjuangan etnis Uyghur. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan bahkan menyebut kebijakan Tiongkok di Xinjiang sebagai "genosida" pada tahun 2009 (Hermanto, 2012).

Erdogan juga lama mendukung gerakan separatisme dan menampung pelarian dari Xinjiang. Para pemimpin Uyghur itu tidak hanya mendapat suaka, tetapi juga dibebaskan untuk melakukan aktivitas politik. Tapi sikap Ankara sudah berubah. Pada 2017 silam menteri luar negeri Turki mengumumkan kebijakan keras terhadap warga Uyghur yang hidup di pengasingan. Demonstrasi dan aksi politik minoritas Uyghur di Turki saat ini tidak lagi diizinkan. Beberapa bahkan ditangkap. Erdogan pada lawatannya musim panas 2019 lalu bahkan memuji kebijakan minoritas pemerintah Tiongkok (Rachel, 2020).

Menurut penulis alasan berubahnya sikap Erdogan tersebut ada dua. Yang pertama adalah memburuknya hubungan Turki dengan negara barat. Ankara mencari kekuatan alternatif dan mendapati Tiongkok sebagai sekutu baru. Yang kedua adalah hubungan dagang. Turki saat ini berlutut melawan krisis ekonomi dan membutuhkan hubungan perdagangan yang sehat. Dengan negara barat situasinya semakin sulit lantaran urusan Hak Asasi Manusia yang berimbas pada hubungan ekonomi. Tiongkok sebaliknya tidak tertarik apakah Erdogan berpihak pada oposisi atau tidak.

Dilansir dari *The Guardian* (2019) Iran misalnya tidak melayangkan kritik terhadap kebijakan Tiongkok. Tiongkok adalah importir terbesar minyak dari Iran, banyak berinvestasi di sektor migas dan aktif melebarkan hubungan dagang dengan Iran. Pakistan dan Arab Saudi juga bungkam atas alasan ekonomi. Pangeran Muhammad bin Salman bahkan memuji kebijakan minoritas Tiongkok dan hal serupa diungkapkan berbagai negara Arab. Dalam hal ini pun hubungan ekonomi menjadi faktor penentu.

Banyak negara Islam dipimpin oleh pemerintahan yang otoriter dan sering mendapat kritik dari negara barat lantaran pelanggaran HAM. Hal ini berlaku untuk Mesir, negara-negara Teluk, untuk Pakistan, Iran dan sejumlah negara lain. Tiongkok sebaliknya sama sekali tidak tertarik pada urusan HAM. Negara manapun bisa berbisnis dengan Tiongkok tanpa perlu takut mendapat kritik terkait kebijakan internal masing-masing.